RENCANA AKSI TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS							PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR	TARGET				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
				I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pengarusutamaan Gender	0,95				0,95	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender	66%	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Peraturan Perundangan PUG (Perda/Perbup/Wali)	25 Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan PUG Prov yang telah dihasilkan	25 PD Prov	Bimbingan Teknis PPRG bagi Kab/Kota se Jawa Timur				
															Jumlah kebijakan Kab/Kota yang telah dihasilkan	26 Kab/Kota					
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi sinkronisasi pelaksanaan PUG Prov	55 Laporan	Pertemuan Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan RAD PUG Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur				
															Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi sinkronisasi pelaksanaan PUG Kab/Kota	35 Laporan	Pertemuan Dalam Rangka Penguatan Perumusan Kebijakan PUG bagi Kab/Kota se Jawa Timur				
																	Penyempurnaan Buku Pedoman PPRG				
																	Bimbingan Teknis PPRG bagi Kab/Kota se Jawa Timur				
																	Pertemuan Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan RAD PUG Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur				
																	Pertemuan Dalam Rangka Penguatan Perumusan Kebijakan PUG bagi Kab/Kota se Jawa Timur				
																	DESK Anggaran Responsif Gender Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur ke-1				
																	Pengembangan Aplikasi PPRG				

									Persentase ARG Jawa Timur	45%		Jumlah Dokumen PPRG yang telah diverifikasi	62 Dokumen	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah PD yang mendapatkan pendampingan	65 PD Prov	Pertemuan Fasilitator dan Tim Penggerak tentang Pengembangan Pembangunan Responsif Gender Provinsi Jawa Timur				
															Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan	38 Kab/Kota	Pertemuan pendampingan perumusan kebijakan desa yang Responsif Gender Jawa Timur				
																	Pertemuan Pengembangan Pelaksanaan DRPPA dan PPRG Desa di Lingkungan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur				
														Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga non pemerintahan yang mendapat sosialisasi pelaksanaan PUG	26 Lembaga	Pertemuan Pemahaman PUG dan PA pada Lembaga Masyarakat Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media Massa dan Lembaga Profesi				
															Jumlah pertemuan dalam rangka sosialisasi dan pendampingan PPRG Tim Penggerak PUG Kab/Kota se Jatim, Auditor, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media	22 Kegiatan					
									Persentase Kab/Kota yang melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan	100%	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang menjadi anggota parlemen	38 Orang	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, sosial, dan budaya	100 Orang	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi dan Lingkungan Kewenangan Provinsi (Seksi Ekonomi dan Lingkungan)				
												Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional	38 Orang		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan lingkungan	90 Orang	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi dan Lingkungan Kewenangan Provinsi (Seksi Politik, Sosial dan Budaya)				

												Jumlah perempuan yang memberikan kontribusi pendapatan keluarga	500 orang				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi dan Lingkungan Kewenangan Provinsi (JUKNIS) - (Seksi Ekonomi dan Lingkungan)				
																	Hibah Kepada Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Timur, Jl. Bandilan No.17, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo				
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum. Sosial dan ekonomi	1 Kali	Pembinaan Pengembangan Produktifitas Usaha Bagi IR (Pelatihan Ketrampilan 2 kali)				
															Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan kebijakan dalam politik hukum sosial budaya	38 Kab/Kota	Pembinaan Pengembangan Produktifitas Usaha Bagi Keluarga PMI (Pelatihan Ketrampilan 2 kali)				
															Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan partisipasi perempuan bidang politik, sosial dan budaya	100 Orang	Pembinaan Pengembangan Produktifitas Usaha Bagi PEKKA (Pelatihan Ketrampilan 2 kali)				
															Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan kebijakan dalam ekonomi dan lingkungan	38 Kab/Kota	Pembinaan Pengembangan Produktifitas Usaha Korban Kekerasan (Pelatihan Ketrampilan 2 kali)				

															Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan partisipasi perempuan bidang ekonomi dan lingkungan	500 Orang	Untuk Menunjang Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan				
																	Kegiatan Penguatan Kelembagaan (Seksi Politik, Sosial dan Budaya)				
																	Orientasi Peran Perempuan Dalam Bidang Politik (Seksi Politik, Sosial dan Budaya)				
																	Peringatan Hari Kartini (Seksi Politik, Sosial dan Budaya)				
																	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partiosipasi Perempuan dalam Ekonomi dan Lingkungan Kewenangan Provinsi (Seksi Ekonomi dan Lingkungan)				
																	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partiosipasi Perempuan dalam Ekonomi dan Lingkungan Kewenangan Provinsi (Seksi Politik, Sosial dan Budaya)				
											Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah penguatan dan pengembangan penyedia layanan pemberdayaan perempuan	100 Orang	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah PD dan Kab/Kota yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	38 PD dan Kab/Kota	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan				
															Jumlah Brosur/leaflet/buku /banner Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	100 Buah					

								Program Perlindungan Perempuan	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan perempuan	1 Kebijakan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan para pihak penyedia layanan	1 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan dan TPPO terhadap perempuan	100 orang	DAK NF BOPPA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO)				
																		Sosialisasi GT TPPO Jawa Timur				
																		DAK NF BOPPA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KtP dan TPPO)				
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Advokasi kebijakan layanan perlindungan perempuan	86 Orang	Sosialisasi RADP3AKS				
																		Rapat Penyusunan Perubahan GT TPPO				
																		Rapat Penyusunan RADP3AKS				
											Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	15 Lembaga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah PD/Kab/Kota yang mempunyai sarana prasarana layanan perempuan korban kekerasan yang sesuai dengan SOP	1 PD/Kab kota	Rapat Review Penyusunan SOP Layanan Perempuan Korban Kekerasan				
														Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM Penyedia Layanan	20 Orang	DAK NF BOPPA MANAJEMEN (Pelatihan Bagi SDM UPTD PPA)				
																		Sosialisasi SOP Layanan Perempuan Korban Kekerasan Bagi Jejaring dan Lembaga Layanan				
														Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kebutuhan spesifik yang tercukupi bagi perempuan	10 Orang					
															Jumlah pelatihan spesifik perempuan	2 Kali					

														Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring penyedia layanan perlindungan perempuan	15 Orang	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan				
											Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang tertangani	85 Orang	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	85 Orang	Rumah Aman				
																	Rapat Koordinasi Penyedia Layanan Pengaduan				
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	10 Kali	APBD				
																	DAK NF BOPPA LAYANAN				
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kebijakan kualitas keluarga yang dikeluarkan	20%	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabkota yang mempunyai kebijakan kualitas keluarga	4 Kabkota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi KIE, KG, dan PA	150 Orang	Pertemuan sosialisasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dalam Keluarga				
															Jumlah media sosialisasi yang digunakan untuk KIE KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga	4 Buah					
								Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase PD yang memanfaatkan data gender dan anak	35%	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang memasukkan Data Gender dan Anak dalam Aplikasi SIGA	45 OPD	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah PD yang memiliki data terpilah gender dan anak	35 PD Prov	Pertemuan Evaluasi Pengisian Aplikasi Pengolahan Data dan Informasi Gender bagi Kabupaten/Kota se Jawa Timur				
														Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah buku yang dihasilkan	3 buku	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				

		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,80				71,80	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang melaksanakan PHA	4 Lembaga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usah yang mendapatkan pendampingan PHA	4 Lembaga	Pertemuan Koordinasi Persiapan Penilaian dan Sosialisasi Aplikasi Evaluasi KLA				
																	Sosialisasi Pengembangan dan Penguatan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota				
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA	76 Orang	FGD Penyusunan RAD KLA Provinsi				
																	Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi				
																	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Sistem Penyelenggara Perlindungan				
											Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga/jejaring yang mendorong Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	76 Orang	Peringatan Hari Anak Tingkat Provinsi Jawa Timur				
														Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	76 Orang	Peningkatan Pemahaman KHA Bagi Tenaga Pendidik SMA/SMK di Jawa Timur				
															Jumlah media sosialisasi yang digunakan dalam Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak	3 Buah	Koordinasi / Konsultasi / Menghadiri Undangan				

																	Bimtek Pelatihan KHA Bagi Fasilitator dan Forum Anak Daerah di Jawa Timur				
								Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan anak	1 Dokumen	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang berpartisipasi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	58 PD Provinsi dan Kab/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak	76 Orang	Bimtek Sistem Perlindungan Anak				
															Jumlah kab/kota yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan kebijakan terkait Pencegahan kekerasan terhadap anak	38 Kab/Kota	RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAN PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (ESA) PROVINSI JAWA TIMUR				
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	76 Orang	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (DAK NF BOPPA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK)				
																	Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Perlindungan Anak				
																	Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (DAK NF BOPPA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK)				
																	Penguatan Kapasitas Jejaring Perlindungan Anak				
											Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jenis Layanan yang Tersedia	100%	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah jenis layanan yang tersedia	4 jenis	Penanganan dan Penjangkauan Kasus				
																	Pemulihan Psikososial Anak				

																	Forum Koordinasi Penguatan Kapasitas Mitra dalam Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur				
																	Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				
																	Penyusunan Panduan dan SOP Perlindungan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan				
																	Bantuan Spesifik Kebutuhan Harian Anak di Rumah Perlindungan				
																	Obat-obatan pemulihan fisik				
																	Biaya Makan Minum Rumah Perlindungan				
																	Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan Anak dan Case Conference				
																	Penanganan dan Penjangkauan Kasus				
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan	20 Orang	Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Kasus Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus				
																	BOPPA LAYANAN				
														Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah media sosialisasi yang dihasilkan	2 Buah	Peningkatan Kapasitas Tumbuh Kembang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat				
															Jumlah peserta sosialisasi terkait KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus	38 Orang					

														Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah jejaring / lembaga penyedia layanan anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	25 Jejaring/Lembaga	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				
											Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang berpartisipasi untuk perlindungan khusus anak	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah sarpras Kab/Kota yang sudah terdata	5 Buah	PERTEMUAN DAN KOORDINASI KERJASAMA LINTAS				
															Jumlah sarpras yang sudah tersedia (UPT PPA Provinsi)	2 Buah					
														Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM	25 Orang	Pelatihan Management dan Penanganan Kasus bagi SDM UPTD PPA dan APH (DAK NF BOPPA MANAJEMEN Perlindungan Kekerasan terhadap Anak)				
																	Pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA/PPT/P2TP2A				
														Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah jejaring penyedia layanan anak yang aktif	15 Jejaring	Penguatan Kapasitas Jejaring Perlindungan Anak				
2	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%				100%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik	100%	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan pendaftaran kependudukan sesuai standar	100%	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM Kebijakan Pelaksanaan Penataan Sistim Administrasi Kependudukan	38 Kab/Kota	Rapat Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kependudukan se Jawa Timur				

									Persentase Kartu Identitas Anak(KIA)	60%					Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional	38 Kab/Kota					
														Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan Layanan Pendaftaran Penduduk se Jawa Timur	38 Kab/Kota	Monitoring dan Evaluasi layanan pendaftaran penduduk di Kab/Kota				
															Jumlah Kab./Kota yang telah melaksanakan SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk	38 Kab/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
														Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Pendaftaran Penduduk di Jawa Timur	38 Kab/Kota	Monitoring dan evaluasi				
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)	2 Buku DKB	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang Pelayanan Adminduknya terkonsolidasi dan terintegrasi Big Database berbasis Penunggalan NIK sesuai Standar	38 Kab/Kota	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu di Jawa Timur	38 Orang	Monitoring dan Evaluasi				
														Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan SDM penyusunan SOP, program kerja, monitoring, evaluasi dan Pengelolaan Data Kependudukan Kab./Kota	38 Orang	Monitoring dan Evaluasi				

											Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tersedianya Database Perorangan yang dapat dimanfaatkan OPD/Lembaga Masyarakat berbadan hukum yang telah mendapat Hak Akses pemanfaatan Data Kependudukan	1 Data	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah buku data kependudukan per semester dan buletin kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	2 Buku	Pengelola Pelaksanaan Bulletin Kependudukan				
																	Penyusunan Buku Database Kependudukan Bersih (DKB)				
																	Pengelola Pelaksanaan Bulletin Kependudukan				
														Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD, Lembaga pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang memanfaatkan Data Kependudukan	4 OPD/Lembaga	Rapat Koordinasi Teknis Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Jawa Timur				
																	Koordinasi dengan Pusat				
											Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Pelayanan Kependudukan yg telah terkonsolidasi dgn BIG Data	38 Kali	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan SIAK dan Data Kependudukan yang telah terkonsolidasi oleh pusat	38 Kab/Kota	Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan SIAK dan Data Kependudukan di Kab/Kota				
								PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah lembaga yg PKS dan memanfaatkan data profil kependudukan Jatim	5 PKS	Penyediaan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan Prov. Jatim yg valid dan update	1 Buku	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah data registrasi dari Kab/Kota	38 Data	Pengumpulan dan Pengolahan Data registrasi kependudukan				
															Jumlah peserta peningkatan SDM dalam rangka Pengembangan Penyelarasan Program Administrasi Kependudukan se Jawa Timur	38 Orang	Peningkatan SDM dalam Pengembangan Penyelarasan Program Administrasi Kependudukan				

														Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Profil Perkembangan Kependudukan yang telah disusun	1 buku	Penyusunan Profil Kependudukan Jawa Timur				
															Jumlah Profil yang telah diinventarisir dari Kab/Kota	38 Buku	Pengumpulan dan Pengollahan Data Profil Kependudukan Kab/Kota				
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,89%				1,89%	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan 5 pilar dalam GDPK	20%	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun 5 Pilar dalam GDPK	8 Kab/Kota	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	38 Kab/Kota	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Pengembangan Program KKBPK				
														Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakatg mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependuduk	114 Orang	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Non Formal dan Informal pada Ormas				
								PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase jumlah kesertaan KB aktif (CPR)	66,08%	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan desain program berbasis kearifan lokal	38 Kab/Kota	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kab/kota yang mendapatkan media promosi	38 Kab/Kota	Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Pengasuh di Pondok Pesantren di Kab/Kota				
														Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan KIE program KKBPK	38 Kab/Kota	Sosialisasi KIE-KB Berbasis Masyarakat				

															Jumlah lembaga yang dibina/mendapatkan penguatan	38 Lembaga					
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Mitra Organisasi Kemasyarakatan di Jawa Timur yang telah mendapatkan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	75%	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pengelolaan desain program pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan	1 Buah	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling yang meningkat kapasitasnya	150 Orang	Peningkatan Kapasitas Remaja dalam Pencegahan Perkawinan Anak dan Pencegahan Stunting secara Hibrid				
														Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Mitra organisasi kemasyarakatan kader yang ter Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	150 Orang	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				
											Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah mitra kerja aktif di tingkat provinsi yg diberdayakan di bidang KS	76 kelompok/organisasi/kader	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah mitra organisasi kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdaya	100 Kelompok	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan Pencegahan Perkawinan Anak				
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,31				82,31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	9 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan				
									Persentase realisasi anggaran	95,75%							Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas PPPA, PPKB dan Kependudukan Provinsi dan kabupaten/Kota				

									Indeks profesionalitas ASN	81,05%				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				
														Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				
														Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD				
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	4 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
																	Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas PPPA, PPKB, dan Kependudukan Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022				
											Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Dokumen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Laporan					
														Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	UPTD				
														Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 Laporan	Kegiatan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan TA 2022				
														Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi Perangkat Daerah	12 Laporan					
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	2 Dokumen					
														Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	1 Dokumen					
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan					
														Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan					
											Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Dokumen	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	1 Paket/LS					
														Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data pegawai	12 Laporan					
														Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	12 Laporan	Monitoring Dan Evaluasi Pegawai				
																	Penilaian Kinerja Pegawai				
																	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
														Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan					

											Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS					
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS	UPT PPA				
														Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS	UPT PPA				
														Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS	UPT PPA				
														Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS					
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS	UPT PPA				
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	4 Laporan	UPT PPA				
											Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	UPT PPA					
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	1 Paket/LS	UPT PPA				
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	1 Paket/LS	UPT PPA				
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Paket/LS	UPT PPA				
														Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Paket/LS					
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket/LS	UPT PPA				
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket/LS	UPT PPA				
											Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Produk Kehumasan yang terverifikasi	100%	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah hasil olah konten dokumentasi Kegiatan Kepala Dinas	1 Paket	UPT PPA				